

243 Honorer K2 Prioritas Jadi CPNS

BATAMKOTA (BP) - Sebanyak 243 tenaga honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkesempatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Birokrasi dan Reformasi (Kemen PAN-RB) berencana melakukan pengangkatan bagi tenaga honorer K2.

"Ya, itu informasi terbaru yang kami terima, akan ada pengangkatan untuk tenaga honorer K2," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKS-DM) Kota Batam M Syahir, Rabu (14/3).



F. DALIL HARAHAP/BATAM POS

M. Syahir

243 Honorer K2 Prioritas Jadi CPNS

Sambungan dari hal 9

Dia menyebutkan, semula tenaga honorer K2 di lingkungan Pemko Batam berjumlah 700 orang. Namun, dari tes penerimaan yang dilakukan sebelumnya, ada 243 orang honorer yang semuanya berprofesi sebagai guru tidak lolos. "Jadi, jika benar ada pengangkatan, mereka inilah yang akan mengikuti seleksi pengangkatan CPNS nantinya," jelasnya.

Sebab, lanjut Syahir, secara kelengkapan dokumen, semua honorer K2 tersebut sudah memenuhi persyaratan dan sudah terdaftar di kepegawaian Pemko Batam. "Semua data sudah sesuai, mulai dari

nama, alamat hingga masa kerja mereka. Jadi tidak perlu khawatir atas pendataan yang dilakukan pusat," sebutnya.

Disinggung mengenai mekanisme pengangkatan tenaga honorer K2 ini, Syahir menyatakan masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. "Apakah nanti ikut tes atau diangkat langsung, kami belum tahu," imbuhnya.

Syahir menambahkan usulan pengangkatan tenaga honorer K2 ini diketahuinya baru dari media, sedangkan surat resmi dari pusat belum ia diterima.

"Informasi yang saya baca, Pak Asman (Menteri PAN-RB Asman Abnur) tengah mendata jumlah tenaga honorer K2 demi menda-

patkan jumlah yang valid. Ya, kita tunggu saja arahan selanjutnya," tambah pria berkacamata ini.

Adapun mengenai kuota formasi CPNS Batam tahun ini, Syahir mengungkapkan belum menerima surat jumlah pasti kuota yang diberikan untuk Batam. "Belum ada kami terima. Informasinya baru Tanjungpinang yang terima," sebutnya.

Namun, lanjutnya, tahun ini Pemko Batam mengajukan sedikitnya 2.431 formasi penerimaan CPNS. Tetapi beberapa kuota yang diberikan tergantung dari keputusan Kemen PAN-RB. Sedangkan formasi yang diajukan didominasi untuk tenaga guru dan tenaga medis. (yui)

Dua Tahun Kepemimpinan Ramah

TEPAT tanggal 14 Maret 2018, pasangan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad genap 2 tahun sebagai Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam. Peringatan 2 Tahun Kepemimpinan Rudi-Amsakar di-sejalankan dengan Upacara Peringatan HUT Satpol PP ke-68, HUT Linmas ke-56

dan HUT Damkar ke-99 Tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri Batamcenter, Rabu (14/3).

Setelah pelaksanaan upacara, dilanjutkan dengan program Talkshow Halo Batam Spesial di salah satu radio swasta di Batam, yang juga dihadiri Gubernur Kepulauan Riau

Nurdin Basirun. Di Program ini, Pemerintah Kota Batam menerima masukan dan informasi tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ingin ditanggapi langsung oleh Rudi-Amsakar. Acara ini juga dihadiri masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Halo Batam.

pada siang hari, Wali Kota bersama Wakil dan Sekda Kota Batam bersilaturahmi dengan pimpinan media se-Kota Batam. Pada kesempatan ini, Wali Kota memaparkan program dan kebijakan Rudi-Amsakar selama memimpin Kota Batam. Rudi Amsakar juga meminta masukan dan

kontribusi pemikiran dari pimpinan media untuk kemajuan Batam menuju Bandar Dunia Madani.***

NARASI : YULITAVIA

FOTO : CECEP MULYANA DAN HUMAS PEMKO BATAM



WALI Kota bersama Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Batam bersilaturahmi dan berdialog dengan pimpinan media se-Kota Batam.



WALI Kota Batam H Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad dipanggul oleh anggota Satpol PP dan Damkar Batam.



WALI Kota Batam H Muhammad Rudi menjadi Inspektur Upacara HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar Tingkat Kota Batam.



WALI Kota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah saat menyaksikan penampilan Pasukan huru-hara Satpol PP Kota Batam.

Nurdin: Rudi-Amsakar Ibarat Main Sulap

BATAMKOTA (BP) - Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengapresiasi pemerintahan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad dalam menaklukkan Kota Batam. Menurutnya, dalam upaya memajukan daerah dan memacu

pembangunan, duet Rudi-Amsakar terus mempercantik kota ini. Bahkan, sepanjang dua tahun ini Batam terus berpacu dengan pembangunan.

"Saya ibaratkan Pemko Batam saat ini kayak tengah

bermain sulap. Dulu infrastruktur sangat minim, sekarang sudah sangat bagus," kata Nurdin saat menjadi narasumber khusus dalam acara Spesial Sempena 2 Tahun

■ Baca **NURDIN:...**Hal 13

Nurdin: Rudi-Amsakar Ibarat Main Sulap

Sambungan dari hal 9

Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Batamcentre, Rabu (14/3).

Menurut Nurdin, kreativitas positif dalam memajukan daerah ini harus diapresiasi dengan dukungan penuh semua pihak. Sebab, kemajuan Batam sepanjang dua tahun ini sangat dirasakan manfaatnya, terutama infrastruktur jalan.

Menurut Nurdin terkait dengan pertumbuhan ekonomi semua harus mendukung. Kini pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama, tengah diupayakan untuk makin membaik. Terlebih, Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, harus bisa kembali menjadi daerah pusat investasi. Karena bila investasi membaik, diharapkan korelasi pertumbuhan ekonomi juga ikut membaik.

"Zaman *now*, kita tidak boleh menyakiti masyarakat. Masyarakatlah yang harus kita utamakan. Masyarakat pembayar pajaklah yang membiayai kita," ungkap Nurdin.

Dalam dua tahun pembangunan Batam, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri berkontribusi dalam pelebaran beberapa ruas jalan Kota Batam. Nurdin ingin pembangunan di Kota Batam terealisasi secara cepat dan tepat, sehingga dapat memicu ekonomi masyarakat Batam dan Kepri.

Paparkan Progres Pembangunan

Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan progres pembangunan Kota Batam selama dua tahun kepemimpinannya, kemarin. Melalui dialog interaktif itu, turut mengundang Forum Komunikasi Hallo Batam, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat Batam untuk mendapatkan masukan.

Menurut Rudi, pembangunan Kota Batam yang dilakukan mengacu pada permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Dan dengan keterbatasan anggaran, tidak seluruhnya dapat diakomodir oleh Pemko Batam, sehingga ada yang menjadi skala prioritas. Namun, dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat,

Prinsipnya, kata Rudi, sebagai pimpinan daerah, bagaimana ia memanfaatkan anggaran yang ada dengan sebaiknya. "Sudah dua tahun saya menjalankan amanah, menjalankan tugas bersama Pak Amsakar memimpin kota ini. Apa yang sudah kami lakukan sampai hari ini belum sempurna," ungkapnya.

Diakuinya, dalam membangun infrastruktur bukan hanya jalan-jalan saja, melainkan membangun drainase untuk menanggulangi titik banjir, dan pembangunan infrastruktur yang diakomodir melalui dana Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK). Setiap tahun dana yang dianggarkan untuk masing-masing kelurahan meningkat. Tahun 2017 Rp1 miliar, sedangkan pada tahun 2018 ini dana PIK yang dianggarkan per kelurahan meningkat jadi Rp1,1 miliar.

"Pembangunan tidak boleh setengah-setengah. Misal, drainase yang dibangun di atasnya dibuat pedestrian untuk pejalan kaki. Jadi sudah ada perhitungannya oleh OPD," ungkapnya lebih lanjut.

Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan Pemko Batam tidak terlepas dari dukungan Pemprov Kepri, dalam hal ini Gubernur Nurdin Basirun. Tahun ini ada tiga penggal jalan utama yang dibangun, dari underpass-Simpang BNI, Simpang BNI-Simpang Frengki, dan dari Simpang Frengki-Simpang Sincom.

Sementara itu, Amsakar menuturkan sejak awal dilantik ia bersama Wali Kota melakukan pembenahan diinternal Pemko, terutama terhadap Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, ia ingin sistem kepegawaian di lingkungan Pemko Batam tampil profesional terutama dalam hal pelayanan.

Di antaranya langkah yang sudah ditempuh, yakni melakukan proses pemetaan kepegawaian secara baik dan benar dengan tujuan untuk mencari pejabat yang kompeten dalam menjalankan tugas. Yaitu dengan melakukan psikotes terhadap calon pejabat.

"Jika dimulai dari input yang baik, maka hasilnya akan benar. Pemikirannya sama antara saya dengan Pak Wali, bahwa perlu dilakukan uji kompeten untuk menentukan pejabat yang berkompoten. Hasilnya ada yang *grade* tinggi dan mana yang rendah akan

kita berikan pembinaan," urainya.

Dalam sistem perencanaan, pengelolaan dan penggunaan keuangan pun mulai dilakukan perubahan sejak tahun 2017. Dimulai dari penerapan sistem anggaran nontunai terhitung 1 Juni 2017 di enam OPD. Secara keseluruhan pada 1 Januari 2018, seluruh OPD di lingkungan Pemko Batam sudah menggunakan sistem nontunai.

Harapannya dengan sistem nontunai ini keuangan di lingkungan Pemko Batam bertambah baik dan menghindari permasalahan hukum. Bahkan, untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, langkah yang dilakukan Pemko Batam adalah menerapkan system e-Planning, e-Budgeting dalam sistem penganggaran.

Tidak hanya itu, Pemko Batam juga menerapkan pelayanan perizinan *online* dengan terus memperhatikan standar mutu pelayanan, kualitas, serta proses.

Dengan berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Batam, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, menetapkan Batam bersama dengan tiga kota besar lainnya, yakni Surabaya, DKI Jakarta, dan Bali sebagai kota percontohan MPP. Mal ini sebagai bentuk pemotongan birokrasi, dimana dalam satu gedung bisa melayani seluruh pelayanan publik.

Di MPP yang berada di Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) Batam, dapat melayani sebanyak 427 perizinan dari 30 instansi vertikal dan 5 perbankan. Bahkan, 427 perizinan dan non perizinan dari 30 instansi di Kota Batam itu telah diintegrasikan.

Gedung dengan konsep modern dan digital tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas di antaranya ruang rapat VIP, ruang bermain anak, ruang menyusui, bahkan ruang pelayanan nikah disiapkan bagi masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia juga telah berkunjung ke Batam untuk meninjau dan belajar konsep pelayanan perizinan yang ada di MPP.

"Layanan publik Batam cukup spektakuler. Jadi percontohan dari berbagai daerah lain," kata Amsakar bangga. (bni/adi)

PENATAAN PASAR

PK-5 Diminta Pindah Sukarela

BATAMKOTA (BP) - Penertiban para Pedagang Kaki Lima (PK-5) masih menjadi prioritas Tim Gabungan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Tahap awal, Satpol PP menggunakan pendekatan persuasif. PK-5 diminta pindah secara sukarela.

"Pendekatan seperti ini dilakukan di beberapa titik PK-5 seperti Pasar Induk Jodoh," kata Syuzairi, Ketua Tim Terpadu Kota Batam, Rabu (14/3).

Menurut dia, saat ini sudah ada kerja sama Pemko Batam dengan PT Cahaya Dinamika yang menampung pedagang di lahan samping pasar induk. Pemandahan sementara pedagang Pasar Induk Jodoh ini dilakukan setelah semua pedagang terdata dan dipindahkan ke lokasi tersebut.

"Sifatnya hanya sementara, setelah pasar induk selesai dibangun dengan desain baru, pedagang dipindah lagi ke sana," tuturnya. Lokasi yang disediakan ini, disebut Syuzairi, juga tidak terlalu jauh dari tempat pedagang berjualan. Selain itu, polanya dilakukan dengan sistem sewa. Pedagang yang dipindahkan tersebut diberi kios berjualan dan membayar sewa kepada pemilik lahan. "Sudah ada bangunannya. Tinggal saat ini kita data berapa jumlah pedagangnya," papar Syuzairi.

Selain PK-5 pasar induk, ia mengakui, pendekatan seperti ini juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di Dam Baloi Kolam. "Untuk Baloi Kolam kita tunggu ketersediaan lahan dari BP Batam. Setelah lahannya tersedia, baru kita sampaikan," jelas Syuzairi. Anggota Komisi I DPRD Batam Tumbur M Sihaloho mengatakan, jika pedagang sudah mau digusur, berarti sudah ada solusi pemerintah untuk pedagang pasar induk. Diingatkan, agar pedagang yang akan direlokasi diberikan solusi yang jelas. "Kita mendukung penataan oleh Pemko Batam dan sepakat dilakukan secara persuasif, sehingga ada solusi dan pedagang tak terbebani," ungkap Tumbur.(rng)

Benahi Birokrasi Wujudkan Transparansi



DUA Tahun lalu, tepatnya tanggal 14 Maret 2016, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H Muhammad Sani melantik dan mengambil sumpah jabatan Walikota Batam, Muhammad Rudi, SE MM dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, SSos, MSi. Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri tertanggal 10 Maret 2016. Dan pada, Selasa 14 Maret 2018, pasangan Rudi-Amsakar (RAMAH) genap berusia dua tahun memimpin Kota Batam.

sejarah dari 30 instansi di Kota Batam telah dimodernisasi. Gedung dengan konsep modern dan digital tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas diantaranya ruang rapat VIP, ruang bermain anak, ruang menyusu bahkan ruang pelayanan sudah di siapkan bagi Masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia juga telah berkunjung ke Batam untuk meninjau dan belajar konsep pelayanan perikanan yang ada di MPP.

Pembangunan Infrastruktur Masih Jadi Fokus Utama
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda terpenting Rudi dan Amsakar. Percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan, dengan tujuan untuk mewujudkan Kota Batam sebagai kota wisata. Pembangunan infrastruktur sangat strategis dan penting karena mampu meningkatkan daya tarik dan menarik manfaat ekonomi. Peningkatan infrastruktur menjadi awal dalam membangun sektor pariwisata ke depannya. Pelebaran jalan berjalannya lancar berkat dukungan dari warga Batam, terutama mereka yang terdampak langsung pelaksanaan jalan tersebut.

Ditandai pada tahun 2016 lalu, Pemko Batam memulai pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Batam bagian Timur sebagai salah satu prioritas pembangunan yang terdampak langsung pelaksanaan jalan tersebut.

Ditandai pada tahun 2016 lalu, Pemko Batam memulai pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Batam bagian Timur. Ditandai dari kawasan Nagoya hingga ke Batam Centre yang merupakan sektor utama pertumbuhan ekonomi Batam.

Kini kondisi jalan di kawasan Nagoya, ruas jalan sudah lebar dan jalan menjadi lebih karena di jalankan dengan peraturan pedestrian bagi pejalan kaki. Dengan sosialisasi perkeluargaan warga Batam, pelebaran yang dilakukan bertujuan untuk mengurai kemacetan yang terjadi terutama di jam-jam sibuk.

Kemudian pada tahun 2017 pelebaran jalan dilakukan di tujuh ruas jalan utama di Kota Batam. Yaitu Simpang Kabil, Simpang KIDA, Simpang RS Elia Beth, Patung Kuda, Simpang Bengkung, Seken, Simpang Indombil, Simpang Balai Centre, Simpang Balai Centre, Simpang Kampung Nelayan, Simpang Apartemen Harmoni, Simpang Pulau Latak Baja, Simpang Jati, Simpang BNI, Kemondian, Simpang Frengki, Simpang Kalicia, Simpang Frengki, Simpang BNI, Simpang BNI, Underpass.

Pada akhir 2019 seluruh jalan di wilayah Batam bagian timur sebagai salah satu prioritas pembangunan yang terdampak langsung pelaksanaan jalan tersebut.

Tanah Langur - Planet Hotel, Simpang Telbau - Under Pass, Simpang Telkem - Plaza Hot dan pelebaran simpang Indombil.

Dilanjutkan di tahun 2015 pembangunan infrastruktur jalan di 10 ruas jalan. Kesepuluh pembangunan jalan tersebut adalah Simpang Masjid Raya - Simpang Kabil, Simpang KIDA - Simpang RS Elia Beth, Patung Kuda - Simpang Bengkung, Seken, Simpang Indombil - Simpang Balai Centre, Simpang Balai Centre - Simpang Kampung Nelayan, Simpang Apartemen Harmoni - Simpang Pulau Latak Baja, Simpang Jati - Simpang BNI, Kemondian, Simpang Frengki - Simpang Kalicia, Simpang Frengki - Simpang BNI, Simpang BNI, Underpass.

Pada akhir 2019 seluruh jalan di wilayah Batam bagian timur sebagai salah satu prioritas pembangunan yang terdampak langsung pelaksanaan jalan tersebut.

Pembangunan Infrastruktur di Kota Batam tentunya mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bangun Jembatan Layang (fly over) di simpang jam yang merupakan salah satu perimpangan terpadat di Kota Batam.

Setelah dibangun selama dua tahun pada tanggal Desember 2017 Fly Over dengan panjang 160 dengan desain Malaysia tersebut diresmikan penggunaannya oleh Walikota Batam H Muhammad Rudi. Setelah berhasil mengurai kemacetan di simpang Jam, Rudi-Amsakar terus menginisiasi pembangunan kembali Fly Over jembatan layang di Simpang Kabil yang telah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat dan akan segera dibangun pada akhir tahun ini.

Diyamping infrastruktur jalan, pembangunan drainase juga digesa oleh Pemko Batam. Untuk meminimalisir tumpukan air yang terakumulasi di wilayah Batam. Penyelesaian permasalahan banjir

Salah satu tugas berat Pemerintah Kota Batam hingga saat ini adalah menyelesaikan permasalahan banjir. Fokus dengan yang dijabarkan dalam visi dan

misal RAMAH 2016-2021. Upaya yang dilakukan di tahap awal kepemimpinan RAMAH pada tahun 2017 ini melakukan penomboran sejumlah alat berat diantaranya becak, long arm dan amfibi. Selanjutnya pada tahun 2018 Pemko Batam menambah tiga lagi alat berat yaitu dan long arm dan satu amfibi untuk terus menyelesaikan permasalahan banjir di daerah wilayah Kota Batam.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)

Pemko Batam juga menganggarkan dana Rp1 miliar di tahun 2017, meningkatkan Rp1,3 miliar di tahun 2018 untuk 64 Kelurahan di Kota Batam. Dalam menerbitkan kegiatan yang dilaksanakan langsung pada resident kerja yang diperolah melalui Masyarakat Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun Fokus Pikiran (Fokir) DPRD. Kegiatan mengacu pada skala prioritas yang telah di input dalam Musrenbang di tingkat Kelurahan.

Dana ini bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, jembatan, Batu Miring dan Balai Serba Guna dengan memberdayakan Camat dan Lurah di Kota Batam serta melibatkan masyarakat," Rudi.

Kesejahteraan warga Batam menjadi salah satu perhatian penting Rudi dan Amsakar. Setiap tahun melalui APBD Kota Batam disanggarkan untuk kegiatan bazar Sembako murah. Dengan subsidi harga Sembako yang diberikan pemerintah diharapkan dapat meringankan perekonomian warga Batam yang sedang lesu.

Dari tahun ke tahun jumlah jodot yang diangkut bertambah. Tahun 2018, Pemko Batam telah menyuguhkan 128 ribu paket Sembako murah yang akan dilaksanakan 2000 untuk tiap kelurahan di Kota Batam.

Sektor Pariwisata Masih Menjadi Andalan
Untuk membangun sektor pariwisata sebagai alternatif mendorong PAD Kota Batam Pemko



Batam terus membenahi infrastruktur dan objek pariwisata baru di Kota ini. Rudi Amsakar bertekad menjadikan Batam sebagai tempat Meeting, Incentive, Convention dan Event (MICE) terbaik di Indonesia.

Sarana Wisata Baru yang juga akan menjadi ikon di Kota Batam adalah Kebun Raya Batam (KRB) yang terletak di Kelurahan Sembilan, Kecamatan Nongsa. Area konservasi tumbuhan ini memiliki luas 86 hektar dan berjarak 10 Km dari Bandara Hang Nadim yang merupakan pintu masuk Wisatawan ke Kota Batam. Kebun Raya juga sangat strategis berada di

tengah-tengah kawasan resort dan wisata alam Nongsa lainnya yang diharapkan menjadi destinasi baru bagi wisatawan di Kota Batam.

Akhirnya, atas kerja keras dan komitmen dalam membangun Kota Batam pada tahun 2017 Pemko Batam berhasil menerima 23 penghargaan dari Pemerintah maupun Lembaga Pendidikan dan Penelitian.

"Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar Pemko Batam terus meningkatkan kinerja terutama dalam melayani kepartisipan masyarakat yang ada di Kota Batam," ujar Rudi-hingga (***).

Batam memiliki sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam, pasangan ini mulai melakukan penyesuaian dari internal Pemerintah Kota Batam.

Dimulai dengan melakukan tes psikologi bagi seluruh pegawai eselon di lingkungan Pemko Batam, termasuk III B dan Uprah sesuai II B. Untuk mengisi jabatan pimpinan tertinggi pertama di lingkungan Pemko Batam pun dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan test yang dilakukan oleh pejabat untuk mengisi para pejabat bukan hanya dari sisi daya tangkap, inteligensi tapi juga dari sisi kepemimpinan. Rudi - Amsakar berprestasi bahwa "the right man on the right place" harus diterapkan untuk mengisi visi dan misi yang sudah ditetapkan.

Dimulai dari perencanaan, pengelolaaan dan penggunaan keuangan pun mulai dilakukan perubahan sejak tahun 2016. Yaitu dengan diterapkannya sistem perencanaan dan sistem penganggaran yang berbasis aplikasi e-Planning e-Musrenbang dan E-Budgeting Pada Tahun 2017.

Tidak hanya itu terlihat 1 Juni 2017 sudah dimulai penerapan sistem non tunai pada transaksi keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimulai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dinas Pendidikan, RSUD Embung Fatimah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Dapenbang) Kota Batam.

Selanjutnya akan ada ke-



Harus Pakai Agunan

Pinjaman Dana Bergulir Pemko Batam ke UMKM

ALFIAN LUMBAN GAOL,
Batamkota

ANGGOTA DPRD Kota Batam, Komisi II meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam selektif dalam mengucurkan dana bergulir. Selain verifikasi permohonan yang ketat oleh tim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), juga harus ada jaminan atau agunan layaknya pengucuran kredit di perbankan.

"Jangan jatuh dua kali di lubang yang sama. Dana cair, tapi uang tak kembali," ujar Mulia Rindo Purba, anggota Komisi II, Rabu (14/3).

Ia mengungkapkan selama ini banyak warga yang meminjam dana bergulir merasa enggung, namun tidak mau mengembalikan dana bergulir karena tidak ada agunan. Akibatnya, Rp 6,5 miliar dana bergulir dari tahun 2001 hingga 2017 macet dan tidak tertagih. Padahal bunganya sangat ringan. "Makanya perlu agunan. Kalau pinjamannya tak dibayar, ada asetnya yang dia gunakan bisa disita," ujarnya.

Rindo yakin selama ini dana bergulir yang dikucurkan ke

sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) banyak tak kembali karena tak ada syarat agunan. Padahal tujuan dana bergulir itu membantu yang kesulitan modal dan tak terjangkau perbankan.

Politikus Gerindra tersebut berharap penerima dana bergulir tahun ini adalah pengusaha mikro seperti pembuat kue basah, bengkel las, salon atau keterampilan lainnya. "Jadi bukan koperasi atau usaha menengah yang butuh anggaran besar. Makanya Pemko harus selektif," katanya.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam Yudi Admaji mengatakan, verifikasi calon penerima dana bergulir dilakukan secara objektif. Meski, ia mengaku kurang mengetahui secara pasti ketentuan mengajukan permohonan dana bergulir tersebut.

Hingga Februari lalu, permohonan dana bergulir yang lolos verifikasi mencapai Rp 1,54 miliar untuk 21 peminjam. "Yang peminjam ini lebih banyak usaha kecil menengah. Hanya ada beberapa saja yang dari kalangan koperasi," katanya. ***



F. DALI, HARAPAN/BATAM POS

SIRAM TANAMAN

DINAS Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam menyiram tanaman yang berada di median Jalan Gajah Mada, Simpang Jam, Rabu (14/3). Penyiraman ini rutin dilakukan untuk menjaga agar tanaman tak layu.

16 Dibu Deserta 170 Instruktur